

Analisis Kebijakan Pembangunan Olahraga Jawa Barat (Penelitian Dilakukan Pada Bidang Kebudayaan Olahraga)

¹Aang Solahudin Anwar, ²Harmawati

e-mail: ¹aang.solahudin@ubpkarawang.ac.id. ²harmawati@ubpkarawang.ac.id

West Java Sports Development Policy Analysis (Research Conducted in the Field of Sports Culture)

Kata Kunci

Analisis Kebijakan
Pembangunan Olahraga
Jawa Barat (Penelitian
Dilakukan Pada Bidang
Kebudayaan Olahraga)

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mencari tahu mengapa kebijakan olahraga di Jawa Barat mampu menghasilkan berbagai penghargaan. Melihat luasnya pengkajian mengenai kebijakan olahraga di Jawa Barat pada Bidang Pembudayaan Olahraga Anak Usia Dini. Penulis mencoba memfokuskan pada kebijakan dalam bidang pembudayaan olahraga, lebih khusus kebijakan pembudayaan olahraga yang berada di kabupaten Karawang. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan beberapa pendekatan kajian literature, wawancara dan studi lapangan bidang yang diteliti. Tujuan penelitian kualitatif ini adalah Mengetahui kelanjutan pembangunan olahraga pasca kepemimpinan Gubernur dan kepala disorba Jawa Barat dan kabupaten khususnya, serta untuk mengetahui arah kebijakan pembangunan olahraga Jawa Barat khusus dalam bidang pembudayaan olahraga di kabupaten Karawang serta Kebijakan baru atau evaluasi dari kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan.

Keywords:

Abstract:

This research is a qualitative research that aims to find out why sports policy in West Java is able to produce various awards. Seeing the extent of the assessment of sports policy in West Java in the Field of Early Childhood Sports Culture. The author tries to focus on policies in the field of sports acculturation, more specifically sports acculturation policies in the Karawang district. The method used in this study uses a qualitative method by carrying out several approaches to the study of literature, interviews and field studies in the field under study. The purpose of this qualitative research is to know the continuation of sports development after the leadership of the Governor and the head of West Java and the district in particular, and to find out the direction of West Java sports development policies specifically in the field of sports culture in Karawang district and new policies or evaluations of the policies that have been implemented .

Article History :

Received : 5 Januari 2019

Revised : 6 Februari 2019

Accepted : 10 Mei 2019

PENDAHULUAN

Hampir satu decade berjalan Provinsi Jawa Barat menjadi sorotan dari aspek pembangunan olahraga hal ini terbukti dengan sukses penyelenggaraan PON XIX tahun 2016 yang dinilai oleh masyarakat Indonesia PON yang dilaksanakan di Jawa Barat merupakan penyelenggaraan even olahraga yang patut dijadikan contoh sebagai Bukti nyata Gubernur Jawa Barat di anugrahi Penghargaan Sebagai Pembina Olahraga Prestasi 2017 (dari laman online <http://jabarprov.go.id> 2017). Ini membuktikan bahwa sebuah kepemimpinan mampu melahirkan kebijakan dalam hal ini kebijakan yang dapat menguntungkan bagi keberlangsungan dunia olahraga yang mana harus ada sebuah kolaborasi bukan hanya pemerintah yang harus konsen dalam bidang ini tetapi berbagai komponen masyarakat lain yang dilibatkan untuk berkolaborasi mensukseskan olahraga *“How do public management with a focus to increase collaboration between the board, management and users operating in times of austerity influence the strategic behaviour of the board, the management and the users of Private Non-Profit sports halls’* (Iversen 2018).

Dinas Pemuda dan Olahraga dan KONI Jabar merupakan lembaga pemerintah yang menangani urusan kepemudaan dan keolahragaan menjadi lembaga yang diandalkan oleh pemerintah Jawa Barat untuk mengarahkan serta menjalankan berbagai kebijakan pemerintah Jawa Barat harus bisa mampu membawa kebijakan yang tertuju pada tujuan yang sesuai dengan tujuan pemerintah Jawa Barat. Arah dan tujuan lembaga kepemudaan dan olahraga tidak mungkin tercapai jika peran kepemimpinan dalam sebuah organisasi. Kepemimpinan dalam sebuah orgnisasi tak terlepas dari kepemimpinan yang dilahirkan bukan dibuat. Mari kita simak pandangan

Dalam hal ini kepemimpinan dalam sebuah kebijakan sangat berperan, peran pemimpin yang dilahirkan mempunyai peranan penting dalam mengambil kebijakan terutama dalam mengelola sebuah tatanan dengan cara bekerjasama dengan pihak lain. Kami sangat tertarik dalam interaksi antara pemangku kepentingan internal, seperti pengusaha lokal, sebagai komitmen dan dukungan sangat penting agar merek tujuan berhasil.

Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat disuatu daerah sangat ditentukan dengan keberhasilan pembangunan manusianya (Muhammad, 2016). Keberhasilan pembangunan suatu wilayah tertentu, dapat diukur secara parsial dengan mengamati bagaimana masalah sosial mendasar pada masyarakat tertentu (Zalaff, Hidayatullah, & Kristiyanto, 2017; Dasar & Decheline, 2017). Permasalahan-permasalahan sosial tersebut diantaranya adalah kemiskinan, pengangguran, buta huruf, ketahanan pangan, dan demokrasi (Dasar & Decheline, 2017).

Masalah kesehatan terutama yang berhubungan dengan rendahnya tingkat kebugaran jasmani memang sedang menjadi perhatian global. Dari Negara maju hingga Negara yang sedang berkembang banyak kasus kesehatan menjadi ancaman nyata bagi negaranya (Kyröläinen, Santtila, Nindl, & Vasankari, 2010). Pemecahan masalah tersebut dapat dilakukan salah satunya 4dengan meningkatkan aktivitas jasmani atau olahraga sebagai langkah preventif (Kruk, 2007; Professional Associations for Physical Activity, 2010)

Seperti yang dikemukakan di atas bahwa pada saat ini di beberapa Negara, pembangunan olahraga bukan menjadi salah satu tujuan akhir. Pergeseran tujuan dari pembangunan olahraga (Shilbury, Popi Sotiriadou, & Christine Green, 2008), menjadi pembangunan melalui olahraga (Darnell, 2010; Ha, Lee, & Ok, 2015) menjadi isu global yang sedang banyak diperdebatkan.

Focus

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mencari tahu mengapa kebijakan olahraga di Jawa Barat mampu menghasilkan berbagai penghargaan. Melihat luasnya pengkajian mengenai kebijakan olahraga di Jawa Barat Penulis mencoba memfokuskan pada kebijakan dalam bidang pembudayaan olahraga, lebih khusus kebijakan pembudayaan olahraga yang berada di kabupaten Karawang . Alasan peneliti mengambil bidang ini merupakan bidang yang konsen dalam memperhatikan olahraga masyarakat dan pembudayaan masyarakat dalam berolahraga, alasan lain penulis kemukakan yakni banyaknya inovasi dalam bidang olahraga yang raih oleh Jawa Barat Khususnya dalam bidang olahraga sehingga menghasilkan berbagai penghargaan dan menjadi lirikan mata dunia. Penelitian ini pun nantinya di desain dengan melihat situasi pada saat proses penelitian berjalan sehingga akan membawa peluang adanya proses bergulirnya suatu permasalahan

Permasalahan

Permasalahan yang dikedepankan dalam penelitian ini bagaimana kebijakan dan peran kepemimpinan di Jawa Barat dalam pembangunan olahraga. Khususnya dalam bidang pembudayaan olahraga terkhusus di daerah kabupaten Karawang, serta Bagaimana kebijakan olahraga mampu masuk kedalam kebijakan Publik

Tujuan penelitian kualitatif ini adalah Mengetahui kelanjutan pembangunan olahraga pasca kepemimpinan gubernur dan kepala disord Jawa Barat dan kabupaten, serta untuk mengetahui arah kebijakan pembangunan olahraga Jawa Barat khusus dalam bidang pembudayaan olahraga. serta Kebijakan baru atau evaluasi dari kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan di lingkungan disord serta provinsi Jawa Barat.

Sebuah layanan informasi melalui internet yang dihimpun oleh Wikipedia dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada organisasi, pemerintah dan kelompok sector swasta serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat melaksanakan dan melarang suatu perilaku (misalnya hukum yang mengharuskan masyarakat membayar pajak), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin mendapatkan hasil yang diinginkan. Kebijakan atau kajian-kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan- keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi alternative seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihan berdasarkan dengan dampaknya. Kebijakan dapat juga siartikan sebagai mekanisme politis, managerial, finansial atau administrative untuk mencapai tujuan eksplisit. Dengan demikian kebijakan didefinisikan sebagai sebagai sebuah produk kepemimpinan (pemerintah) yang menjadi pilihannya untuk dijadikan pegangan dalam melaksanakan program bagi masyarakat sesuai dengan sasaran yang ingin ditujunya. Lebih lanjut Hill, Michael (1993:8) dalam *understanding social policy*, menjelaskan bahwa *the concept of policy has a particular status in the rational model as the relatively durable element against which other premises and action are supposed to be tested for consistency* (konsep kebijakan memiliki status tertentu dalam model rasional sebagai elemen yang relatif tahan lama terhadap tempat dan tindakan lain yang seharusnya diuji untuk konsistensi). Sedangkan Nugroho, Riant. (2011: 96) memberikan kata kebijakan (policy) yakni *an authoritative decision. Decision made by the one who hold the authority, formal and informal*. Kebijakan adalah sebuah keputusan otoritatif. Kebijakan dibuat oleh seseorang yang memiliki otoritas formal atau non formal.

Kebijakan public (*Public Policy*). Merupakan padanan kata yang sering mengemuka yang sering muncul dalam ilmu politik dan banyak ditelaah dan diteliti secara akademik. Sebagaimana kebijakan yang telah dijelaskan di atas. Nugroho, Riant (2011: 96) kata Public bukanlah umum, rakyat, masyarakat, maupun sekedar stake holder. *Public* adalah a spare

where people become citizen, a space where citizen interact, where state society exist. Yaitu bilamana orang menjadi warga Negara, ruang dimana warga Negara berinteraksi, dimana masyarakat dan Negara itu berada.

Selanjutnya Dye, Thomas R (1995) memberikan pengertian singkat mengenai istilah kebijakan public, yaitu *is whatever government choose to or not to do* yang bermakna bahwa kebijakan public adalah apa yang ingin dikerjakan pemerintah untuk mengerjakan sesuatu untuk tidak mengerjakan sesuatu. Selanjutnya Dye, Thomas R (1995) memberikan pengertian singkat mengenai istilah kebijakan public, yaitu *is whatever government choose to or not to do* yang bermakna bahwa kebijakan public adalah apa yang ingin dikerjakan pemerintah untuk mengerjakan sesuatu untuk tidak mengerjakan sesuatu. Penjelasan Nugroho dan Dye memberikan catatan penting bahwa kebijakan public erat kaitannya dengan Negara.

James E. Anderson (1984) (dalam <http://retorics.blogspot.co.id/2015/02>) memberikan pengertian kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

James E. Anderson (1984) secara lebih jelas menyatakan bahwa yang dimaksud kebijakan adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Pengertian ini menurutnya berimplikasi:

1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan,
2. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah,
3. Kebijakan merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah,
4. Kebijakan bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu,
5. Kebijakan, dalam arti positif, didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (otoritatif).

Indonesia memiliki Jawa Barat dan sebagai provinsi maju di Indonesia banyak memberikan arahan mengenai pembangunan sesuai dengan yang dikeluarkan oleh dinas pemuda dan olahraga Jawa Barat terkait kebijakan mengenai pemuda, karena pemuda merupakan tulang punggung dari sebuah kemajuan daerah sebagai mana yang disampaikan dalam web Dispora Jabar "Pembangunan pemerintah dibagian pemuda dapat dimaknai sebagai strategi yang dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan peran serta pemuda dalam seluruh aspek kehidupan manusia dan memperhatikan serta melibatkan pemuda ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Kebijakan publik sebagai kebijakan untuk dibuat oleh institusi otoritatif yang ditujukan dan berdampak kepada publik serta ditujukan sebagai persoalan-persoalan yang ada di publik. Lebih lanjut Madani, Muhlis (2011) dengan mengutip pendapat Hogwood dan Gun dalam Rachmat (2009 : 130) menjelaskan suatu kebijakan Negara sebagai tindakan yang mengarah pada suatu tujuan, akan dapat dipahami dengan baik dengan merinci ke lima kategori, yaitu ; (1) tuntunan kebijakan (policy demands), di dalam politik, proses formulasi suatu kebijakan negara merupakan berbagai desakan atau tuntutan dari para aktor pemerintah maupun swasta kepada pejabat untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan terhadap suatu masalah tertentu, (2) keputusan kebijakan (policy decision) merupakan keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah,

dengan maksud untuk memberikan keabsahan, kewenangan atau memberikan arahan terhadap pelaksanaan kebijakan Negara. (3) pernyataan kebijakan (policy statement), merupakan pernyataan resmi atau artikulasi (penjelasan) mengenai kebijakan Negara tertentu. (4) keluaran kebijakan (policy output) merupakan wujud kebijakan Negara yang paling dapat merealisasikan apa yang telah digaris bawahi dalam keputusan dan pernyataan kebijakan Negara. (5) hasil akhir kebijakan (policy outcome), setelah suatu kebijakan selesai diimplementasikan terdapat hasil akhir kebijakan, yaitu merupakan akibat-akibat dapat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik yang mengharapkan maupun yang tidak mengharapkan sebagai dari konsekuensi adanya tindakan pemerintah dalam bidang -bidang atau masalah tertentu.

Kebijakan pembangunan olahraga jawabarat di Indonesia tidak lepas dari dasar cita-citra pembangunan nasional, yang dituangkan dalam Perpres. Perpres No. 2 Tahun 2005 hal ihwal terkait dengan pembangunan olahraga masuk dalam bagian 7.8 dengan tema memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia, yaitu: Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial dipandang memiliki arti penting dalam upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang hidup rukun, damai, bermoral dan berbudaya, sehingga bangsa Indonesia mampu menjaga perbedaan dalam persatuan dan kesatuan. Restorasi sosial dimaksudkan untuk meletakkan Pancasila pada fungsi dan peranannya sebagai dasar filsafat negara, membebaskannya dari stigma, serta diberi ruang pemaknaan yang cukup, dalam rangka merespon tantangan perubahan jaman. Keragaman ras, suku bangsa dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan potensi bangsa, sehingga perlu dikelola dengan baik guna memperkuat jati diri bangsa, serta modal untuk menjadi negara yang maju dan modern. Selain itu, keragaman ini juga mengandung nilai-nilai kearifan lokal seperti nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang dapat dimanfaatkan untuk merespon modernisasi agar sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan. (Perpres Nomor 2:2015)

Melihat arah Perpres diatas diatas pemerintah melalui olahraga memiliki Sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan olahraga dalam RPJMN 2015-2019, dalam hal ini Ma'mun dalam (online) <http://fpok.upi.edu/artikel/isu> Sasaran yang akan dicapai dalam rangka meneguhkan kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial pada tahun 2015-2019, khusus yang terkait dengan bidang olahraga; 1) meningkatnya budaya dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional yang ditandai dengan: (a) meningkatnya persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga; (b) posisi papan atas pada kejuaraan South East Asia (SEA) Games dan ASEAN Para Games 2015, 2017 dan 2019; dan (c) meningkatnya perolehan medali pada kejuaraan Asian Games dan Asian Para Games 2018, serta Olympic Games dan Paralympic Games 2016. 2) Arah kebijakan dan strateginya adalah menumbuhkan budaya olahraga dan prestasi, melalui: (1) Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan; (2) Peningkatan akses dan partisipasi masyarakat secara lebih luas dan merata untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani serta membentuk watak bangsa; (3) Peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga; (4) Peningkatan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan; (5) Peningkatan pola kemitraan dan kewirausahaan dalam upaya menggali potensi ekonomi olahraga melalui pengembangan industri olahraga; dan (6) Pengembangan sistem dan penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan

Dengan melihat catatan mengenai kebijakan yang dikeluarkan melalui perpres memberikan arahan sekaligus target yang harus dicapai malah jangan sampai sama sekali sebuah kebijakan yang sudah dibuat mengalami kendala apalagi kebijakan tersebut di kurangi bahkan di tiadakan seperti yang terjadi di Negara Belanda bahwa Pemotongan kebijakan olahraga telah mengurangi partisipasi olahraga di tingkat akar rumput (Daniel Parnell, 2018)

Selanjutnya berkaitan dengan upaya meningkatkan mutu dari kebijakan olahraga. Ada tekanan dari pemerintah untuk menjaga hubungan yang baik dengan organisasi elit olahraga, karena mempunyai manfaat besar yang bisa dirasakan bagi kinerja olahraga. Pertanyaan seperti; "Bagaimana cara mengendalikan?", "Bagaimana cara meningkatkan efisiensi?", "Bagaimana cara meningkatkan akuntabilitas?" Dan "bagaimana untuk mendapatkan dan mempertahankan legitimasi.

Pertanyaan diatas merupakan sebuah strategi bagaimana cara membentuk dan mempertahankan kinerja organisasi olahraga dalam hal ini lembaga keolahragaan di Jawa Barat yang pastinya harus dilaksanakan dan dijalankan dalam menjalankan roda organisasi. Dalam perjalanan organisasi tak terlepas dari adanya permasalahan yang hadapi untuk menjawab permasalahan tersebut perlu digeneralisasi terlebih dahulu bentuk permasalahan pembangunan di Jawa Barat khususnya pada bidang pembudayaan olahraga.

Dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora, 2010:23-26) Nomor 0022 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga 2010-2014 dapat dirangkum permasalahan pembangunan olahraga, yaitu meliputi: (1) tata kelola sistem pembinaan olahraga melalui jalur pendidikan, seperti PPLP 133, PPLM 21 dan sekolah khusus olahraga/SKO empat yang belum terstandarisasi, antara lain disebabkan oleh karena rendahnya kualitas tenaga keolahragaan dalam menjalankan pembibitan dan terbatasnya prasarana dan sarana; (2) belum membudayanya olahraga di masyarakat secara luas, dimana angka partisipasi anak usia 10 tahun ke atas berada di kisaran 26,9 % dan nilai indeks pembangunan olahraga dalam bentuk SDI tergolong rendah; (3) lemahnya upaya meningkatkan prestasi olahraga nasional dan internasional, antara lain disebabkan oleh karena: sistem pembibitan yang belum berjalan optimal, penerapan IPTEK dan kesehatan olahraga yang belum menjangkau dan meluas, dan terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga dan pembina keolahragaan; (4) kurangnya pendanaan, baik dari pemerintah melalui APBN maupun APBD, dan (5) rendahnya apresiasi dan penghargaan bagi olahragawan dan tenaga keolahragaan yang berprestasi, termasuk tata kelola atau manajemen keolahragaan secara umum yang juga dilengkapi dengan profil prasarana olahraga hasil survei BPS melalui PODES (2008).

Mari kita kritisi bahwa permasalahan tersebut walaupun sudah merangkum tiga ruang lingkup olahraga, akan tetapi perumusannya masih belum tajam. Permasalahan pertama, mengarah pada pemaknaan olahraga pendidikan, akan tetapi terjemahannya tidak sesuai dengan substansi UU-SKN, karena olahraga pendidikan hanya dimaknai dalam tataran pembibitan yang digambarkan oleh PPLP/PPLM dan SKO. Hal ini menunjukkan bahwa pemaknaan olahraga selama ini adalah berujung pada prestasi. Tentu pemaknaan seperti ini tidak tepat, dimana sesungguhnya olahraga dalam perspektif pendidikan haruslah menjadi bagian integral dari kehidupan peserta didik di persekolahan sehingga perlu dilayani dan diselenggarakan dengan standar yang tinggi dan/atau melampaui batas minimal serta tidak semata-mata ditujukan untuk peningkatan prestasi, tetapi untuk memberikan jalan keluar bagaimana setiap peserta didik berkesempatan potensi dirinya tumbuh dan berkembang secara menyeluruh dan sempurna. Manakala ada peserta didik yang berminat dan berbakat dalam olahraga, baru kemudian difasilitasi secara khusus.

Bukti bahwa kebijakan olahraga yang baik membawa dampak bagi pembangunan nasional dalam hal ini bahwa Kebijakan olahraga publik di Inggris telah mengakui pentingnya pengalaman olahraga sebagai fitur utama olahraga nasional pembangunan adalah signifikan.

Strategi selanjutnya mengatakan "ukuran kepuasan pelanggan saat ini, yang dikumpulkan oleh Orang Aktif (Survei) dan Ambil Bagian (Survei) cenderung fokus ada penyediaan fasilitas. Namun, melihat ke depan, kami perlu mengembangkan survei baru untuk mengukur kepuasan orang dengan kualitas pengalaman olahraga mereka dan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang berbagai faktor yang terlibat dalam

Olahraga yang berbeda. Kami mengantisipasi bahwa pendorong utama akan menjadi komponen yang akrab dari olahraga komunitas - fasilitas, klub, pelatih, relawan dan kompetisi struktur' (hal. 18).

Permasalahan kedua, dengan bersandarkan pada perhitungan *Sport Development Index* (SDI), yang indikatornya terdiri atas: partisipasi, ruang terbuka, kebugaran jasmani, dan kualitas sumber daya manusia atau tenaga keolahragaan, kegiatan olahraga belum meluas di masyarakat, baik jumlah maupun kualitasnya. Hal ini sudah sesuai dengan hakikat kegiatan olahraga rekreasi pada pasal 19 ayat 1 UU-SKN (2011:11), yaitu sebagai bagian dari proses pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran. Barangkali hal yang sangat penting terkait dengan olahraga rekreasi adalah kehadiran program pemerintah untuk meluaskan kegiatan olahraga bagi seluruh lapisan masyarakat.

Metodelogi

Kebijakan pembangunan di Jawa Barat dirasa perlu dilirik dan menurut hemat penulis kebijakan olahraga dijawabarat perlu diapresiasi dan dijadikan sebagai acuan pembangunan olahraga di daerah daerah lain. Untuk mengetahui mengapa kebijakan pembangunan olahraga di Jawa Barat perlu di lirik?, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menggali secara lebih mendalam. Alasan penulis menggunakan metode kualitatif dikarenakan metode tersebut dianggap sangat tepat dan bahkan hanya melalui studi kualitatif penulis bisa menemukan pertanyaan penelitian dalam pokok bahasan Kebijakan pembangunan Olahraga di Jawa Barat khususnya pada bidang pembudayaan olahraga. Karena dalam studi kualitatif mempunyai karakteristik yang tidak dimiliki oleh studi kuantitatif. Karakteristik pembangunan yang dominan muncul dalam penelitian ini adalah terdapatnya perspektif pembangunan yang berkelanjutan dan perlu dijadikan sebagai pilot Project pembangunan olahraga di daerah lainnya. Karakteristik lainnya adalah Refleksivitas mempelajari fenomena sosial mempengaruhi berlakunya fenomena tersebut. Saya sebagai penulis/peniliti harus menjadi bagian dari dunia yang mereka geluti yakni berusaha untuk memahami dari segi literasi atupun terjun bersama pemangku kebijakan bertanya , menelaah, bertanya mengenai pembangunan olahraga di Jawa Barat. Penelitian yang akan dilakukan ini merupakan studi fenomenologi dengan menggunakan pendekatan kualitatif, studi ini mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu atau lembaga.

Desain penelitian yang digunakan adalah pengumpulan data (Sarah Lewis, 2012) mengemukakan Pengumpulan data yang didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang saling terkait dirancang untuk mengumpulkan informasi untuk dijawab pertanyaan penelitian yang muncul. Pada penelitian ini penulis mencoba menggali berbagai informasi

Ketekunan Pengamatan

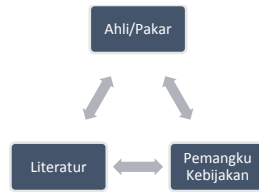
Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciriciri dan unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Wiliam Wiersma dalam Bachri (2010: hlm. 55-56) ada 3 macam triagulasi sebagai teknik pemeriksaan penggunaan sumber, teknik/metode, waktu.

Triangulasi Sumber

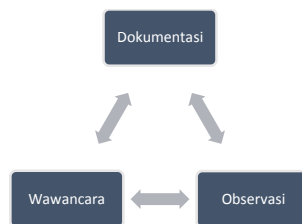
Triangulasi sumber bertujuan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi sumber dalam penelitian ini dapat diilustrasikan seperti di bawah ini:



Gambar 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik bertujuan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalkan saja peneliti pada awalnya memperoleh data dengan wawancara, lalu dalam teknik triangulasi teknik ini peneliti akan menguji kredibilitas data awalnya tersebut dengan teknik observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Triangulasi teknik dalam penelitian ini diilustrasikan seperti di bawah ini:



Gambar 2. Triangulasi Teknik

Hasil dan Pembahasan

Dalam pembahasan hasil penelitian banyak terjadi temuan di lapangan bahwa upaya pemerintah provinsi Jawa Barat mempunyai visi dan Misi yang sejalan dengan dinas pemuda dan olahraga hal ini dibuktikan dengan adanya *Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Bathin dengan inovasi dan kolaborasi* Dispora Jabar bobot dan beban kerjanya relevansi dengan Misi ke 2 Pemprov. Jabar yakni : *“Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif”*.

Berdasarkan penelitian yang kami lakukan selamat tahun pelaksanaan didapatkan hasil penelitian analisis sebagai berikut:

1. Pelaksanaan olahraga di Jawa Barat telah menjadi tradisi bahwa dalam setiap event olahraga yang diikuti harus membuahkan prestasi, karena Jawa Barat sudah menjadi role model bagi provinsi lain dalam bidang olahraga khususnya.
2. Event olahraga Jawa Barat telah dilakukan di tingkat Jawa Barat dan diikuti oleh penyelenggara event olahraga di bawahnya (tingkat Kabupaten) namun ketika kami menemui salah satu Kabupaten kegiatan tersebut acuanannya berdasarkan tahun sebelumnya yang sudah ada. Jadi program olahraga di tingkat Kabupaten belum mengacu kepada peraturan yang dibuat oleh pemerintah kabupaten tersebut.
3. Pembinaan olahraga usia dini untuk tingkat Jawa Barat sudah ada di tingkat kabupaten hampir rata-rata di tiap kabupaten mempunyai Pusat latihan pelajar (PLP)

usia Dini, namun tidak semua kecabangan olahraga di PLP tiap kabupaten ada semua jenis kecabangan olahraga hanya di buatkan PLP yang sifatnya di unggulkan oleh kabupaten tersebut. Seperti halnya di Kabupaten Karawang ,PLP yang menjadi prioritas adalah olahraga anggar. Karena Olahraga Anggar merupakan Unggulan dari Kabupaten tersebut.

4. Pembinaan olahraga dimasyarakat dilakukan dengan memanfaatkan tenaga (Sarjana Pendamping Penggerak Pembangunan Olah Raga (SP3OR). Para tenaga SP3OR mendampingi masyarakat yang ingin mengembangkan diri melalui olahraga, Memberikan edukasi terkait olahraga yang ada di masyarakat, serta mendampingi masyarakat dalam berolahraga guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga.
5. Menurut masyarakat Sandi Arisman (Kepala Bagian Pembudayaan Olahraga) bahwa Sejauh ini angka partisipasi masyarakat dalam berolahraga terus meningkat saat ini sudah 56 % masyarakat di Jawa Barat yang menik mati olahraga dan menganggap olahraga sebagai kebutuhan hidup masyarakat Jawa Barat. Semoga dengan melihat angka partisipasi masyarakat j Jawa Barat dalam berolahraga yang cukup signifikan dapat berdampak positif kepada yang lain.
6. Satu hal yang masih menjadai Pekerjaan Rumah (PR) Bagi Dispora bidang pemberdayaan olahraga masyarakat yaitu salah satunya pembuatan peraturan daerah mengenai pelaksanaan olahraga pertandingan tradisional untuk para penyandang disabilitas. Peraturan ini yang menjadi bentuk Produk kebijakan dari penelitian yang akan kami rekomendasikan kepada Dinas pemuda dan olahraga Jawa Barat untuk dijadikan bahan kebijakan yang nantinya menjadi bahan untuk peraturan daerah (Perda Jawa Barat).

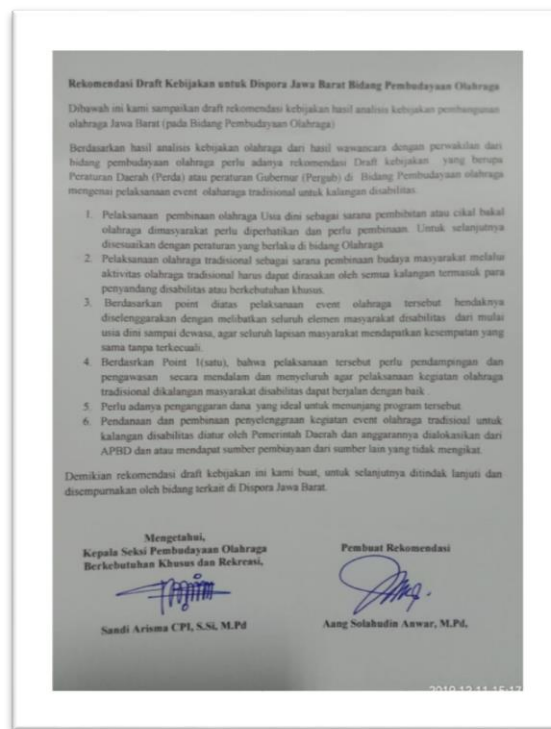
Selain hal diatas yang menjadi analisa kami bahwa mengapa Jawa Barat menjadi Provinsi yang dalam bidang Olahraga unggul dalam bidang olahraga yakni mempunyai bentuk kegiatan yang terprogram, hal ini dapat dilihat dari adanya Relevansi dispora Jabar dengan pemerintah Jawa Barat *Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Bathin dengan inovasi dan kolaborasi*”Dispora Jabar bobot dan beban kerjanya relevansi dengan Misi ke 2 Pemprov. Jabar yakni : *“Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif”*.



Gambar 1

Penyerahan Dokumen Draft Rekomendasi Kebijakan pada bidang Pembudayaan Olahraga kepada kepala Seksi Sumberdaya Olahraga berkebutuhan khusus dan Rekreasi.

Peningkatan partisipasi masyarakat Jawa Barat dalam berolahraga akan berdampak langsung pada kesehatan dan kebugaran yang pada gilirannya akan menghasilkan masyarakat yang produktivitasnya tinggi serta angka harapan hidup meningkat pula. Hal itu pula harus dirasakan oleh semua kalangan termasuk saudara kita penyandang disabilitas.



Gambar 2

Dokumen Draft Rekomendasi Kebijakan pada bidang Pembudayaan Olahraga.

Atas dasar di atas kami peneliti berdiskusi dengan bidang pembudayaan olahraga berkebutuhan khusus dan rekreasi untuk membuat sebuah kebijakan (Draf) untuk direkomendasikan pada Peraturan Bupati atau Wali Kota (Perbup atau Perwal) dan peraturan Gubernur (Pergub) mengenai penyelenggaraan Olahraga untuk kalangan disabilitas.

Kesimpulan.

Dari penelitian yang kami lakukan berujung kepada satu pembahasan yakni mengenai produk Kebijakan dalam pembudayaan olahraga. Adapun draf kebijakan yang kami usulkan untuk seksi pembangauna olahragaa dan untuk selanjutnya kebijakan tersebut dapat direkomendasikan kebijakan (Draf) untuk direkomendasikan pada Peraturan Bupati atau Wali Kota (Perbup atau Perwal) dan peraturan Gubernur (Pergub) mengenai penyelenggaraan atau event pertandingan olahraga Tradisional Bidang pembangunan Olahraga.

Saran

Penelitian ini perlu di tindak lanjuti dan dilakukan pada periode selanjutnya.

Daftar Pustaka

- Darnell, S. C. (2010). Power, Politics and "Sport for Development and Peace": Investigating the Utility of Sport for International Development. *Sociology of Sport Journal*, 27(1), 54-75. <https://doi.org/10.1123/ssj.27.1.54>
- Dasar, S., & Decheline, G. (2017). Hasil Pembangunan Olahraga Di Kota Jambi Ditinjau Dari Sport Development Index. *Jurnal Pendidikan Jasmani Dan Olahraga*, 2(2), 61-71.
- Ha, J.-P., Lee, K., & Ok, G. (2015). From Development Of Sport to Development Through Sport: A Paradigm Shift for Sport Development in South Korea. *The International Journal of the History of Sport*, 32(10), 1-17. <https://doi.org/10.1080/09523367.2015.1062756>
- Kruk, J. (2007). Physical activity in the prevention of the most frequent chronic diseases: An analysis of the recent evidence. *Asian Pacific Journal of Cancer Prevention*, 8(3), 325-338.
- Kyröläinen, H., Santtila, M., Nindl, B. C., & Vasankari, T. (2010). Physical fitness profiles of young men: associations between physical fitness, obesity and health. *Sports Medicine (Auckland, N.Z.)*, 40(11), 907-920. <https://doi.org/10.2165/11536570-000000000-00000>
- Madani, Muhlis. (2011). *Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*, Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Ma'mun. (2017). *Isu Strategis dan Arah Kebijakan Pembangunan Olahraga Pendidikan (Sebuah Telaah Kebijakan)*
- Muhammad, Z. (2016). Improving Quality of Life through Community-based Participatory Development in Nigeria: Explanatory Factors for Success and Failure. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 222, 151-159. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.206>
- Nugroho, Riant. (2011). *Public Policy: Dinamika Kebijakan*, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Professional Associations for Physical Activity. (2010). Physical Activity in the Prevention and Treatment of Disease. In *Swedish National Institute of Public Health*.
- Shilbury, D., Popi Sotiriadou, K., & Christine Green, B. (2008). Sport Development. Systems, Policies and Pathways: An Introduction to the Special Issue. *Sport Management Review*, 11(3), 217-223. [https://doi.org/10.1016/S1441-3523\(08\)70110-4](https://doi.org/10.1016/S1441-3523(08)70110-4)
- Zalaff, K., Hidayatullah, M. F., & Kristiyanto, A. (2017). *European Journal of Physical Education and Sport Science SPORTS HUMAN RESOURCE MANAGEMENT OF SPORT DEVELOPMENT INDEX IN PADANG , WEST SUMATRA , INDONESIA - EVALUATION STUDIES OF THE AVAILABILITY OF SPORTS HUMAN RESOURCE MANAGEMENT*. 97-104. <https://doi.org/10.5281/zenodo.438132>